



PELUANG DAN TANTANGAN SDM INDONESIA MENYONGSONG ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Dewi Wuryandani*)

Abstrak

Persaingan di bursa tenaga kerja akan semakin meningkat menjelang pemberlakuan pasar bebas ASEAN pada akhir 2015. Pembinaan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan dan kemajuan suatu bangsa. Sebaliknya, tenaga kerja Indonesia juga memiliki peluang yang sangat besar untuk mengisi lapangan pekerjaan yang semakin terbuka, mengingat jumlah penduduk Indonesia sebanyak 43 persen dari jumlah penduduk ASEAN dan angkatan kerja kita mencapai 125,3 juta orang pada tahun 2014, bertambah sebanyak 5,2 juta orang dari tahun lalu. Dengan demikian, Pemerintah, DPR dan swasta harus bersinergi membuat kebijakan yang relevan dan saling mendukung dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bermartabat.

Pendahuluan

Sejak satu dekade lalu, para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 mendatang. Ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat dan menarik investasi asing serta bisa menyaingi Cina dan India. Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat.

Salah satu isu yang mengemuka terkait dengan implementasi MEA adalah kesiapan sumber daya manusia (SDM). SDM ini tidak hanya mereka yang bekerja di pemerintahan melainkan juga yang bergelut di dunia usaha, khususnya yang bekerja di sektor usaha kecil menengah (UKM) dan informal. MEA tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya.

Menurut Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Indah Sari,

*) Peneliti Muda Kebijakan dan Administrasi pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI. E-mail: dewi.wuryandani@gmail.com.



MEA mensyaratkan adanya penghapusan aturan-aturan yang sebelumnya menghalangi perekrutan tenaga kerja asing. Pembatasan, terutama dalam sektor tenaga kerja profesional, didorong untuk dihapuskan sehingga MEA akan lebih membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang selama ini tertutup atau minim tenaga asingnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, sejumlah lembaga atau asosiasi profesi telah banyak mempersiapkan diri dengan memperkuat kapasitas para anggotanya sehingga tenaga kerja ahli di Indonesia akan mampu bersaing. Sebagai contoh, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah banyak melakukan kerja sama dengan lembaga profesi sejenis di negara-negara ASEAN lainnya.

Upaya ini bertujuan untuk menyetarakan berbagai program *capacity building* dan standar keahlian agar akuntan dari masing-masing negara memiliki keahlian dengan persyaratan minimum yang sama. Dengan begitu, akuntan Indonesia bisa langsung *match* dengan kebutuhan profesi ketika bekerja di negara ASEAN lainnya. Demikian halnya dengan profesi bankir dan profesi di industri keuangan lainnya.

Peluang dan Tantangan Pasar ASEAN

Secara umum setidaknya-terdapat empat hal penting terkait pelaksanaan MEA 2015. *Pertama*, ASEAN sebagai pasar dan produksi tunggal. *Kedua*, pembangunan ekonomi bersama. *Ketiga*, pemerataan ekonomi. Dan, *keempat*, perkuatan daya saing, termasuk pentingnya pekerja yang kompeten.

Kesepakatan pelaksanaan MEA ini diikuti oleh 10 negara anggota ASEAN yang memiliki total penduduk 600 juta jiwa dan sekitar 43 persen jumlah penduduknya ada di Indonesia. Artinya, pelaksanaan MEA akan menempatkan Indonesia sebagai pasar utama yang besar, baik untuk arus barang maupun investasi.

Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja karena akan tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses untuk pergi ke luar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan

kemungkinannya tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang bagus bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Sebaliknya, situasi seperti ini juga memunculkan risiko ketenagakerjaan bagi Indonesia. Dilihat dari sisi pendidikan dan produktivitas Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Laporan Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Organisasi Buruh Internasional (ILO), MEA dapat menciptakan 14 juta lapangan kerja tambahan atau mengalami kenaikan 41 persen pada 2015 karena semakin bebasnya pergerakan tenaga kerja terampil. Pertumbuhan ekonomi regional pun bisa terdongkrak menjadi 7 persen. Namun demikian, Indonesia kemungkinan tidak banyak diuntungkan. Taksiran lapangan kerja baru hanya mencapai 1,9 juta atau 1,3 persen dari total pekerja. Sementara ILO memperkirakan permintaan akan tenaga kerja kelas menengah akan meningkat 22 persen atau 38 juta dan tenaga kerja level rendah meningkat 24 persen atau 12 juta. Menurut kajian tersebut, sekitar setengah dari tenaga kerja sangat terampil diramalkan akan bekerja di Indonesia. Sayangnya, sebagian besar lapangan pekerjaan itu justru akan diperebutkan oleh calon pekerja yang kurang terlatih dan minim pendidikan. Akibatnya, kesenjangan kecakapan itu akan mengurangi produktivitas dan daya saing Indonesia.

Keadaan ketenagakerjaan di Indonesia pada Februari 2014 menunjukkan adanya perbaikan yang digambarkan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja maupun jumlah penduduk bekerja dan penurunan tingkat pengangguran. Data tentang jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Perkembangan Angkatan Kerja dan Jumlah Penduduk yang Bekerja di Indonesia

Keterangan	Februari 2013	Februari 2014	% ^{*)}
Jumlah Angkatan Kerja	123,6	125,3	1,38
Jumlah Penduduk yang Bekerja	116,5	118,2	1,46

Sumber: www.bps.go.id, 2014

Adapun beberapa persoalan mendasar yang masih dihadapi Indonesia dalam rangka menghadapi MEA 2015. *Pertama*, masih tingginya jumlah pengangguran terselubung (*disguised unemployment*). *Kedua*, rendahnya jumlah wirausahawan baru untuk mempercepat perluasan kesempatan kerja. *Ketiga*, pekerja Indonesia didominasi oleh pekerja tidak terdidik sehingga produktivitas mereka rendah. *Keempat*, meningkatnya jumlah pengangguran tenaga kerja terdidik, akibat ketidaksesuaian antara lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. *Kelima*, ketimpangan produktivitas tenaga kerja antarsektor ekonomi. *Keenam*, sektor informal mendominasi lapangan pekerjaan, dimana sektor ini belum mendapat perhatian optimal dari pemerintah. *Ketujuh*, pengangguran di Indonesia merupakan pengangguran tertinggi dari 10 negara anggota ASEAN, termasuk ketidaksiapan tenaga kerja terampil dalam menghadapi MEA 2015. *Kedelapan*, tuntutan pekerja terhadap upah minimum, tenaga kontrak, dan jaminan sosial ketenagakerjaan. *Kesembilan*, masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang banyak tersebar di luar negeri.

Agenda Kebijakan ke Depan

Indonesia masih memiliki cukup waktu untuk melakukan negosiasi ulang mengenai poin-poin penting yang disepakati untuk memberikan keuntungan pada posisi Indonesia. Pola atau model yang telah diterapkan oleh negara-negara anggota Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) sebaiknya tidak diterapkan pada kesepakatan MEA. Sebagian poin-poin pada MEE harus dihindarkan pada MEA sehingga MEA harus lebih menjamin penyerahan keputusan kepada setiap negara anggota. Dalam konteks ini Indonesia bisa memainkan peran pentingnya.

Sosialisasi juga harus dilakukan pemerintah dalam konteks persiapan MEA. Sosialisasi tersebut bukan semata-mata mengenai cara menembus pasar ASEAN tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana pengusaha nasional bisa bertahan di pasar lokal di tengah-tengah besarnya perdagangan jasa dari ASEAN, yang tentunya akan melibatkan SDM tenaga kerja yang ahli dan terampil

Setiap sektor akan membutuhkan koordinasi dan konsolidasi lintas-sektoral. Sejalan dengan itu, diperlukan pengawalan percepatan pembangunan infrastruktur sehingga Indonesia bisa mengambil manfaat positif dari era komunitas ASEAN. Era baru masyarakat ASEAN ini tentunya juga memicu ketatnya persaingan antar-kawasan di masa-masa mendatang sebagai akibat meningkatnya arus perdagangan dan modal. Namun demikian, liberalisasi ini juga dinilai berpotensi mempertajam ketimpangan.

Kebanyakan kesempatan kerja akan menyentuh sektor perdagangan, konstruksi, serta transportasi, dan wilayah kerja informal yang diisi lebih banyak tenaga lelaki ketimbang perempuan. Tingkat perpindahan pekerja berketerampilan rendah hingga menengah juga akan terdongkrak. Hal demikian mensyaratkan peningkatan upaya perlindungan. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengakui pentingnya regulasi penempatan pekerja asing yang lebih baik meskipun lapangan kerja yang membutuhkan kecakapan rendah juga masih tersedia secara luas.

Indonesia diuntungkan pada sektor kimia, konstruksi, perdagangan, dan transportasi. Namun ketiga sektor tersebut membutuhkan keterampilan tinggi. Oleh karena itu, berbagai program peningkatan SDM dapat dilaksanakan dengan bekerja sama antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi dan masyarakat untuk menyiapkan angkatan kerja berketerampilan tinggi. Selain itu dapat juga dilakukan melalui pengenalan IPTEK, karena dampak yang ditimbulkan oleh teknologi dalam era globalisasi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, sangat luas. Teknologi ini dapat menghilangkan batas geografis pada tingkat negara maupun dunia. Dalam aspek ekonomi dengan adanya IPTEK, SDM Indonesia akan semakin meningkat seiring dengan proses alih pengetahuan dari teknologi tersebut. sehingga secara tidak langsung juga akan mempengaruhi peningkatan ekonomi di Indonesia.

Penutup

Para pelaku ekonomi secara tidak langsung akan menghadapi banyak permasalahan dalam meningkatkan daya saing di era MEA. Terbatasnya modal kerja, kapasitas SDM yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan, bahasa asing serta teknologi adalah sebagian permasalahan yang dihadapi.

Usaha peningkatan kualitas SDM bisa ditempuh dengan upaya sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan akademisi untuk menetapkan standar kompetensi profesionalisme di masing-masing sektor. Upaya peningkatan kualitas SDM untuk bersaing dalam menghadapi MEA 2015 harus segera dilaksanakan dalam rangka mencapai kemajuan dan mengejar ketertinggalannya dari negara-negara lain.

Seiring dengan kedudukan dan peran tenaga kerja yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional, momentum berlakunya MEA harus menjadi agenda nasional dalam menata persoalan tenaga kerja selama ini. Oleh karena itu, revisi kembali atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pun layak dipertimbangkan sebagai payung hukum dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja secara umum sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Paradigma baru peningkatan kualitas tenaga kerja bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu standar kompetensi kerja, pelatihan berbasis kompetensi serta sertifikasi kompetensi oleh lembaga yang independen.

Dalam rangka ini, kolaborasi yang sinergis antara Pemerintah, DPR (legislator), dan para pelaku usaha (swasta) sangat dibutuhkan. Selain itu, infrastruktur baik secara fisik dan sosial (hukum dan kebijakan) perlu dibenahi. Upaya peningkatan kemampuan serta daya saing tenaga kerja dan perusahaan di Indonesia misalnya, dapat dilakukan dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh pendidikan/pelatihan, sertifikasi di bidang keahlian mereka. Dengan begitu, Indonesia dapat menghindari sebagai penonton di negara sendiri setelah berlakunya MEA.

Referensi

- “APTISI Nilai PTS Belum Siap Hadapi MEA 2015”, <http://news.metrotvnews.com/read/2014/08/29/284491/8203-aptisi-nilai-pts-belum-siap-hadapi-mea-2015> diakses tanggal 5 September 2014.
- “Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik”, http://www.bps.go.id/brs_file/naker_05mei14.pdf diakses tanggal 9 September 2014.
- “Hadapi MEA Kualitas SDM Indonesia Harus Ditingkatkan”, <http://www.tempo.co/read/news/2014/06/25/090587928/Hadapi-MEA-Kualitas-SDM-Indonesia-Harus-Ditingkatkan>, diakses tanggal 5 September 2014.
- “Masyarakat Ekonomi ASEAN Sulit Dicapai Tahun Depan”, <http://www.tempo.co/read/news/2014/08/25/092601932/Masyarakat-Ekonomi-ASEAN-Sulit-Dicapai-Tahun-Depan>, diakses tanggal 9 September 2014.
- “MEA 2015 dan Kesiapan Sumber Daya Manusia Indonesia”, <http://www.businessnews.co.id/ekonomi-bisnis/mea-2015-dan-kesiapan-sumber-daya-manusia-indonesia.php>, diakses tanggal 5 September 2014.
- “Menuju ASEAN Economic Community”, http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/Setditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20ECONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf, diakses tanggal 9 September 2014.
- “Kesiapan SDM Daerah Menghadapi MEA 2015”, <http://www.koran-sindo.com/node/413050>, diakses tanggal 5 September 2014.
- “Kesiapan Sumber Daya Manusia Indonesia Menyongsong Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA 2015”, <http://regional.kompasiana.com/2014/06/28/kesiapan-sumber-daya-manusia-sdm-indonesia-menyongsong-implementasi-masyarakat-ekonomi-asean-mea-2015-664888.html>, diakses tanggal 5 September 2014.
- “Peluang, Tantangan dan resiko Bagi Indonesia Dengan Adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN”, <http://www.crmsindonesia.org/node/624>, di akses tanggal 9 September 2014.